

partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran ini diwujudkan melalui berbagai instrumen pengawasan seperti rapat kerja dengan pemerintah daerah, rapat dengar pendapat, peninjauan lapangan, pembentukan panitia khusus, hingga penyerapan aspirasi masyarakat melalui forum-forum publik maupun kanal aduan resmi DPRD. Meskipun demikian, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi DIY sampai saat ini belum menunjukkan adanya pemanfaatan instrumen hak seperti hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi DIY masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencapai fungsi pengawasan yang substantif dan solutif.
2. Efektivitas peran DPRD Provinsi DIY dalam pengawasan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dapat dikatakan telah berjalan, namun belum optimal. DPRD Provinsi DIY telah melaksanakan pengawasan pada tahap perencanaan, pelaksanaan,

maupun evaluasi kebijakan pengelolaan sampah. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan tersebut masih bersifat parsial, karena lebih berfokus pada aspek administratif dan pelaksanaan teknis kebijakan, tanpa diikuti mekanisme pengawasan yang komprehensif, berkelanjutan, dan menyeluruh terhadap seluruh proses kebijakan. Selain itu, efektivitas pengawasan juga masih terhambat oleh beberapa faktor, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, perbedaan prioritas anggaran antara DPRD Provinsi DIY dan pemerintah daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Kendala-kendala tersebut menyebabkan rekomendasi DPRD Provinsi DIY tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Meski demikian, DPRD Provinsi DIY telah berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan melalui penguatan peran komisi terkait, peningkatan kapasitas anggota, serta perluasan ruang partisipasi publik.

B. Saran

1. Dalam pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan penguatan fungsi pengawasan DPRD Provinsi DIY melalui pembentukan panitia khusus (pansus) permanen di bidang persampahan dan lingkungan hidup. Keberadaan pansus permanen ini bertujuan agar kegiatan pengawasan tidak bersifat *ad hoc*, melainkan berlangsung secara berkesinambungan, konsisten, dan terarah. Selain itu, DPRD Provinsi DIY juga perlu mengoptimalkan

penggunaan hak-hak konstitusionalnya, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sebagai instrumen politik hukum untuk menilai dan mengoreksi kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan persampahan. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi berperan nyata sebagai sarana evaluasi dan penyelesaian permasalahan sampah secara substantif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. DPRD Provinsi DIY bersama Pemda DIY perlu melakukan evaluasi dan revisi terhadap regulasi pengelolaan sampah yang berlaku, agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan antarperaturan daerah serta antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi dan kolaborasi antarpemerintah daerah juga harus diperkuat guna mengembangkan sistem pengelolaan persampahan regional yang lebih efektif. Di samping itu, pemerintah daerah bersama DPRD perlu menetapkan kebijakan yang lebih konkret dan partisipatif untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik melalui program edukasi, pemberdayaan bank sampah, maupun insentif bagi masyarakat yang menerapkan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle (3R)*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ardipandanto, Aryo Jati, dkk. 2020, *Peranan DPRD Dalam Pengambilan Kebijakan Daerah* (Cetakan Pertama), Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Cahyadi, Amelia, dkk. 2023, *Hukum Pengawasan* (Cetakan Pertama), Remaja Rosdakarya, Bandung.
- DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023*, DLHK DIY, D.I Yogyakarta.
- Hestu Cipto Handoyo B., 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia* (Cetakan ketiga), Kanisius, D. I Yogyakarta.
- Huda, Ni' Matul, 2009, *Hukum Pemeritahan Daerah* (Februari 2009), Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Indartini, Mintarti, dkk. 2019, *Peran dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Penganggaran Daerah*, Taujih, Solo.
- Manullang M., 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, D.I Yogyakarta.
- Noor, Muhammad, dkk. 2022, *Collaborative Governance* (Cetakan pertama), Bildung, Yogyakarta.
- Rauf, Rahyunir, 2018, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Edisi Pertama), Zanafa Publishing, Pekanbaru.
- Soewargono, Soeyatno, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Edisi Pertama), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sururama, Rahmawati dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintah*, Cendekia Press, Bandung.

Skripsi/Tesis:

- Ali Muhammad Haidar, 2020, *Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Keistimewaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undangundang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

Anggraini, Fanny Ardanti dan Rifqi Atha Adriyanto, 2025, *Perencanaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman*, Tesis, Program Sarjana Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.

Kurniawan, Endri, 2018, *Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Sampah Rumah Tangga Ditinjau Dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mellinia, Ananda, 2024, *Implikasi Inovasi Pelayanan Pengaduan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Responsivitas Pemerintah (Studi Kasus Aplikasi Lapor Sleman)*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, hlm. 82

Rusianti, Yuliana Zeni, 2016, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kota Pontianak*, Program Sarjana Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Tunggal, Alfines, 2015, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal Hukum:

Anam, Syaiful dan Khairil Anwar, 2020, "Efektivitas Pengawasan SPRD Dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.10 No.2, Universitas Tribhuwana Tungadewi.

Anggraini, Fitrijati, 2016, "Aspek Kelembagaan Pada Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional", *Jurnal Permukiman*, Vol. 6 No. 2 Agustus 2016, Pusat Penelitian dan Pengembangan.

Azzahra, Nadiva Salsabilla, dkk. 2025, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan urusan Lingkungan Hidup", *Jurnal Pembangunan Nagari*, Vol.10 No.1 Juni 2025, Universitas Andalas.

Budimantoro, Christian dan Supriyanto, 2024, "Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kontribusinya Untuk Masyarakat". *Jurnal Ilmiah*

- Budiyono, 2013, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.1, Universitas Lampung.
- Djafar, Husnul Khatimah, dkk. 2024, “Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Lex Philosophy*, Vol.5 No.2 Desember 2024, Universitas Muslim Indonesia.
- Lantaeda, Syaron Brigitte, dkk. 2017, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04 No. 048, Universitas Sam Ratulangi.
- Litualy, Jurgen dan Agustinus Nindatu, 2023, “Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No.2 Desember 2023, Universitas Pattimura.
- Purwendah, Elly Kristiani, dkk. 2022, “Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat”, *Jurnal Locus Delicti*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2022, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Sarry, F. Y., dan Utama, 2021. “Efektivitas Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat”. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Universitas Diponegoro.
- Surya, Ida dan Abdul Wahab, 2023, “Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.8 No.2 Desember 2023, Universitas Mataram.
- Tjendra, Virginia dan Mella Ismelina, 2024, “Analisis Permasalahan Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol.5 No.1 November 2024, *Dinasti Review*.
- Yanthi, Ni Putu Ayu Budha dan I ketut Markeling, 2019, “Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Bali Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol.7, No.9, 2019, Universitas Udayana.

Website:

Agung Setio Apriyanto, 2020, Tingkatkan Pelayanan Publik Melalui Penanganan Pengaduan, [http://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--tingkatkan-pelayan-publik-melalui-pengaduan-diskses-pada 20 Agustus 2025](http://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--tingkatkan-pelayan-publik-melalui-pengaduan-diskses-pada-20-Agustus-2025).

Analekta, 2024, Penutupan TPST Piyungan Mengakibatkan Jalan Penuh Sampah, <https://www.balairungpress.com/2024/03/penutupan-tpst-piyungan-mengakibatkan-jalanan-penuh-sampah/>, diakses 10 Agustus 2025.

Daud Arie Ristiyono, 2023, Carut Marut Pengelolaan Sampah di Yogyakarta, <https://news.detik.com/kolom/d-6903797/carut-marut-pengelolaan-sampah-di-yogyakarta> , diakses 28 Maret 2025.

DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025, Sosialisasi Penerapan Sanksi Denda Administratif Bidang Lingkungan Hidup untuk Sektor Pariwisata, <https://dlhk.jogjaprov.go.id/sosialisasi-penerapan-sanksi-denda-administrasi-bidang-lingkungan-hidup-sektor-pariwisata/>, diakses pada 5 Agustus 2023.

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023, Cari Masukan Soal Perda Nomor 3 Tahun 2013, Pansus Gelar Public Hearing, <https://www.dprd-diy.go.id/cari-masukan-soal-perda-nomor-3-tahun-2013-pansus-gelar-public-hearing/>, diakses pada 12 Agustus 2025.

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023, Hadirkan DLH Kabupaten Kota, Pansus BA 46 Tahun 2023 Gali Masukan dan Evaluasi atas Implementasi Perda, <https://www.dprd-diy.go.id/hadirkan-dlh-kabupaten-kota-pansus-ba-46-tahun-2023-gali-masukan-dan-evaluasi-atas-implementasi-perda/>, diakses pada 10 Agustus 2025.

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023, Pansus BA 46 Tahun 2023 Tinjau Pengelolaan Sampah di DIY Berdasarkan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013, <https://www.dprd-diy.go.id/pansus-ba-46-tinjau-pengelolaan-sampah-di-diy-berdasarkan-perda-diy-nomor-3-tahun-2013/>, diakses tanggal 10 Agustus 2025.

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023, Pansus Pengawasan Perda Pengelolaan Sampah DIY Sepakat Finalisasi Hasil Pembahasannya, <https://www.dprd-diy.go.id/pansus-pengawasan-perda-pengelolaan-sampah-diy-sepakat-finalisasi-hasil-pembahasannya> , diakses Pada 10 Agustus 2025.

- DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023, Pansus Pengawasan Perda Pengelolaan Sampah DIY Laporkan Hasil Kerjanya dalam Rapat Paripurna, <https://www.dprd-diy.go.id/pansus-pengawasan-perda-pengelolaan-sampah-diy-laporkan-hasil-kerjanya-dalam-rapat-paripurna/>, diakses pada 10 Agustus 2025
- DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025, Komisi C Tinjau TPST Piyungan: Soroti Dampak Penutupan dan Dorong Kemandirian Pengelolaan Sampah, <https://www.dprd-diy.go.id/komisi-c-tinjau-tpst-piyungan-soroti-dampak-penutupan-dan-dorong-kemandirian-pengelolaan-sampah-daerah/>, diakses pada 10 Agustus 2025
- DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025, Ketua DPRD DIY Hadiri Workshop Penguatan KPP: Dorong Peran Strategis dan Responsif Gender, <https://www.dprd-diy.go.id/ketua-dprd-diy-hadiri-workshop-penguatan-kpp-dorong-peran-strategis-dan-responsif-gender/>, diakses pada 28 Agustus 2025.
- Humas Pemda DIY, 2024, Danais Amankan Desentralisasi Penanganan Sampah Kota Yogyakarta, <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail-berita/danais-amankan-desentralisasi-penanganan-sampah-kota-yogyakarta>, diakses pada 30 Agustus 2025
- Luqman Hakim, 2025, ITF Bawuran di Bantul ditargetkan beroperasi awal Maret 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4620806/itf-bawuran-di-bantul-ditargetkan-beroperasi-awal-maret-2025>, diakses pada 3 September 2025
- Nabila Zahra Nur Aminah dan Adina Muliawati, 2021, Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan, <https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konteks-pembangunan-berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management>, diakses 28 Maret 2025.
- Tim Prodi PKP Pascasarjana UGM, 2024, Semakin Mendesak, Isu Sampah Menjadi Sorotan, <https://pkp.pasca.ugm.ac.id/2024/09/30/semakin-mendesak-isu-sampah-kembali-menjadi-sorotan>, diakses 28 Maret 2025
- Tim Redaksi Joglosemarnews, 2023, Dampak Penutupan TPS Piyungan: Tumpukan Sampah Bermunculan di Dekat Kebun Binatang Hingga Area Kuliner Yogyakarta, <https://joglosemarnews.com/2023/07/dampak-penutupan-tpa-piyungan-tumpukan-sampah-bermunculan-di-dekat-kebun-binatang-hingga-area-kuliner-yogyakarta/>, diakses 10 Agustus 2025.

Tim DetikJogja, 2023, Jogja Darurat Sampah Buntut Penutupan TPA Piyungan, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6849285/jogja-darurat-sampah-buntut-penutupan-tpa-piyungan>, diakses 10 Agustus 2025.

Triya Andriyani, 2024, Jogja Darurat Sampah, Pakar UGM Sarankan Edukasi Pemilahan di Masyarakat, <https://ugm.ac.id/id/berita/jogja-darurat-sampah-pakar-ugm-sarankan-edukasi-pemilahan-di-masyarakat>, diakses 28 Maret 2025.

Yosef Leon, 2024, Program Desa Zero Waste di DIY Diprediksi Tekan 15 Persen Produksi Sampah, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/06/05/510/1176947/program-desa-zero-waste-di-diy-diprediksi-tekan-15-persen-produksi-sampah>, diakses 30 Agustus 2025

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2. Sekretariat Daerah. Yogyakarta

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No. 123 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi DIY dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 16. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

